

Judul : Komisi VII DPR Merasa Dilangkahi: Berani-beraninya Banggar Pangkas Subsidi Listrik...
Tanggal : Minggu, 25 September 2016
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Komisi VII DPR Merasa Dilangkahi

Berani-beraninya Banggar Pangkas Subsidi Listrik...

Pembahasan subsidi listrik di Senayan memanaskan. Komisi VII DPR tidak terima dengan keputusan Badan Anggaran (Banggar) yang memotong subsidi listrik hingga Rp 4 triliun. Komisi yang membidangi energi ini beranggapan, penentuan subsidi listrik adalah hak mereka.

RABU lalu, Wakil Ketua Banggar Said Abdullah menerangkan, pihaknya dan pemerintah sudah sepakat untuk memotong subsidi listrik dari Rp 48,56 triliun seperti dalam nota keuangan RAPBN 2017 menjadi Rp 44,98 triliun.

Dengan pemotongan ini, masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi listrik hanya 23,15 juta pelanggan. Rinciannya, sebanyak 19,1 juta merupakan pelanggan 450 watt dan 4,05 juta pelanggan 900 watt. Di luar angka itu, akan dikenakan tarif listrik listrik keekonomian. Data ini mengacu pada hasil kajian Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Anggota Komisi VII DPR Satya W Yudha memprotes keputusan ini. Menurut politisi Golkar ini, Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM telah sepakat bahwa keputusan pencabutan subsidi listrik harus mendapat persetujuan atau restu komisinya. Atas dasar itu, dia menganggap kesepakatan antara pemerintah dan Banggar DPR tadi belum final, karena belum mendapat persetujuan Komisi VII.

"Keputusan Banggar belum final. Kami tetap meminta pengambilan keputusan di Banggar harus mendengar

atau memerhatikan keputusan Komisi VII. Sampai saat ini, mayoritas fraksi di Komisi VII DPR belum menerima pengurangan subsidi," tegasnya.

Menurutnya, pengurangan itu jelas akan menimbulkan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) terhadap pelanggan yang dinyatakan tidak berhak mendapat subsidi. Kondisi ini akan menambah beban masyarakat di tengah himpitan ekonomi yang sulit.

Baginya, kenaikan TDL harus menjadi jalan terakhir atas kondisi keuangan negara saat ini. Sebelum melakukan pemotongan subsidi, pemerintah harus bisa memastikan bahwa PLN telah melakukan sejumlah efisiensi sehingga biaya produksi listrik tidak membengkak.

"Masih ada beberapa cara lain dan efisiensi yang bisa dilakukan. Sayangnya, pemerintah hanya mencari jalan pintas dalam pengurangan besaran subsidi, yakni menaikkan harga," sesalnya.

Satya tak menapik adanya subsidi yang tidak tepat sasaran. Namun, ia meminta pemerintah melakukan pendataan ulang sebelum membahas besaran kenaikan TDL dengan Komisi VII DPR.

"Data yang mereka kirim masih kasar, belum bisa meya-

kinkan Komisi VII. Sebelum pendataan ulang selesai, kami tidak akan menyetujui kenaikan atau pengurangan subsidi listrik," tegasnya.

Anggota Komisi VII DPR Joko Purwanto juga mengungkapkan ketidasetujuannya atas keputusan Banggar itu. Politisi PPP ini khawatir pencabutan subsidi listrik akan berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat menengah ke bawah.

"Pemerintah perlu berhati-hati terhadap dampak yang ditimbulkan dari rencana tersebut. Berdasarkan kajian BI (Bank Indonesia), rencana tersebut bisa menyumbang inflasi yang cukup tinggi, hampir 1 persen," jelas Joko.

Awalnya, pelanggan yang mendapat subsidi 45,1 juta, dengan rincian 22,8 juta pelanggan golongan 450 watt dan 22,3 pelanggan golongan 900 watt.

Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widiyanto menyatakan, angka itu tidak sesuai dengan kondisi warga yang berhak mendapatkan subsidi di masyarakat. Data yang benar adalah pelanggan 450 watt berjumlah 19,1 juta dan pelanggan 900 watt berjumlah 4,05 juta.

Dengan berpegang pada data ini, rapat Banggar memutuskan mengurangi subsidi.

"Sehingga, total subsidi yang akan diberikan turun menjadi Rp 44,98 triliun," kata Staf Ahli bidang Komunikasi dan Sosial kemasyarakatan Kementerian ESDM Ronggo Kuncahyo. ■ ONI